

Eksistensi *Policy Entrepreneurs* Dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia

Mira Aulia^{1*}

Abstrak

Reformasi demokrasi dan administrasi pendidikan di Indonesia pada tahun 2001 membuka jalan bagi aktor non-partisan seperti *policy entrepreneurs* untuk dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. *Policy entrepreneurs* dapat digambarkan sebagai pendukung perubahan kebijakan yang dicirikan oleh individu atau organisasi yang termotivasi. Dengan menggunakan sumber daya dan pengaruhnya, mereka bertindak sebagai agen perubahan sepanjang siklus kebijakan dengan menghadirkan solusi kebijakan yang inovatif, membangun koalisi dukungan, dan mengamankan tindakan legislatif. Korelasi antara *policy entrepreneurs* dengan perubahan kebijakan ditunjukkan melalui pendekatan teoritis *multiple streams*, koalisi advokasi, inkrementalisme dan *punctuated equilibrium*, serta neo-institusionalisme. Kebutuhan yang besar akan aktor *intelligence* seperti *policy entrepreneurs* yang mampu melangkah maju dan mengkatalisasi proses perubahan kebijakan di Indonesia menjadi alasan penulis membuat artikel ini. Penulis menghimpun data serta melakukan tinjauan dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya dan berusaha untuk menyajikannya secara komprehensif, sehingga diharapkan artikel ini akan mempermudah pembaca dalam memahami posisi maupun peran *policy entrepreneurs* dalam formulasi kebijakan. Terakhir, pada dua penelitian sebelumnya mengenai *policy entrepreneurs* di Indonesia yang ditinjau pada artikel ini ditemukan bahwa *policy entrepreneurs* di Indonesia dapat hadir melalui organisasi *think tanks*.

Kata kunci: *policy entrepreneurs*, kebijakan, pendidikan

History:

Received : 28 Nov 2023

Revised : 29 Nov 2023

Accepted : 5 Dec 2023

Published : 14 Dec 2023

¹Universitas Airlangga

*Author Correspondent: mira.aulia-2021@fisip.unair.ac.id

Publishers: LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Pendahuluan

Jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia pada tahun 1998 (reformasi) membuka jalan bagi serangkaian perubahan pada konstitusi dan pemerintahan. Menurut Antlöv et al. (2006) dan Hadiz et al. (2005) diantara yang dimaksud adalah pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan pemerintahan sipil, serta reformasi birokrasi dan partisipasi yang lebih besar dari peran aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan (dalam Arief, 2021). Meskipun telah mengalami “Reformasi”, namun laporan Bank Dunia tahun 2006 menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia terus mengalami hambatan, seperti pembangunan yang tidak merata; birokrasi yang terdesentralisasi dengan fragmentasi dan kompleksitas kelembagaan; kapasitas pemerintah yang lemah, terutama di bidang pembuatan kebijakan yang berdasarkan bukti; dan penangkapan lembaga-lembaga negara oleh banyak elit beserta kelompok kepentingan (Bank Dunia, 2006). Adanya “Reformasi” juga membuka peluang bagi aktor non-negara untuk mengambil peran yang lebih menonjol dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Sehingga untuk mengisi kekosongan atas kebutuhan tersebut maka peran aktor *intelligence* seperti *policy entrepreneurs* diperlukan.

Menurut Gunn (2017) meskipun munculnya *policy entrepreneurs* tidak berarti bahwa perubahan kebijakan akan terjadi, namun *policy entrepreneurs* merupakan salah satu aktor kebijakan

yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi substansial dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Beberapa strategi dan kemampuan yang dimiliki oleh *policy entrepreneurs* seperti; membangun narasi; berkomunikasi; mampu menangkap peluang; memiliki jaringan yang luas; mengetahui masalah kebijakan; mengetahui proses kebijakan; memiliki *personal traits* yang menyenangkan; dan memahami konteks, membantu mereka untuk dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengubah konten kebijakan yang akan diadopsi oleh para pengambil keputusan.

Kebutuhan yang besar akan aktor *intelligence* seperti *policy entrepreneurs* yang mampu melangkah maju dan mengkatalisasi proses perubahan kebijakan di Indonesia menjadi alasan penulis membuat artikel ini. Melalui artikel ini, penulis menghimpun data serta melakukan tinjauan dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya dan berusaha untuk menyajikannya secara komprehensif, sehingga diharapkan artikel ini akan mempermudah pembaca dalam memahami posisi maupun peran *policy entrepreneurs* dalam formulasi kebijakan.

Dalam artikel ini, penulis akan memulai pembahasannya dengan mendefinisikan *policy entrepreneurs* menurut beberapa ahli, kemudian penulis akan berusaha mengkorelasikan antara *policy entrepreneurs* dengan perubahan kebijakan, lalu terakhir penulis juga akan mencoba mengeksplorasi eksistensi *policy entrepreneurs* di Indonesia melalui *literature review* penelitian terdahulu. Penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi fenomena nyata pada saat ini berdasarkan fakta (Rukajat, 2018). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan *literature review* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengambil dan mengumpulkan pokok pikiran dari penelitian sebelumnya, serta menganalisis beberapa ringkasan para ahli yang tertulis di dalam teks untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan pengetahuan, sumber dorongan dari pembuatan kebijakan, dan menstimuli ide baru yang berguna untuk panduan penelitian di bidang tertentu (Snyder, 2019).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara wajar, natural, dan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi (Arifin, 2012). Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi fenomena nyata pada saat ini berdasarkan fakta (Rukajat, 2018). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan *literature review* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengambil dan mengumpulkan pokok pikiran dari penelitian sebelumnya, serta menganalisis beberapa ringkasan para ahli yang tertulis di dalam teks untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan pengetahuan, sumber dorongan dari pembuatan kebijakan, dan menstimuli ide baru yang berguna untuk panduan penelitian di bidang tertentu (Snyder, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Definisi *Policy Entrepreneurs*

Definisi *policy entrepreneurs* yang paling terkenal berasal dari Kingdon (1984) yang mendefinisikan *policy entrepreneurs* sebagai aktor yang tidak selalu ditemukan di satu lokasi dalam komunitas kebijakan. Mereka bisa berada di dalam atau di luar pemerintahan, dalam posisi terpilih atau ditunjuk, dalam kelompok kepentingan atau organisasi penelitian. Namun ciri khas mereka, seperti halnya pengusaha bisnis, adalah kesediaan mereka untuk menginvestasikan sumber daya mereka - waktu, energi, reputasi, dan kadang-kadang uang dengan harapan pengembalian di masa depan. Pengembalian itu mungkin datang kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang mereka setuju, kepuasan dari partisipasi, atau bahkan peningkatan pribadi dalam bentuk keamanan kerja atau promosi karir. (Kingdon, 1984). Melalui definisi milik Kingdon ini dapat diketahui bahwa *policy entrepreneurs* berbeda dari aktor-aktor lain karena kesediaan mereka untuk mengambil risiko dan perilaku mereka yang selalu berorientasi pada tujuan.

Selanjutnya Petridou et al. (2015) mendefinisikan *Policy entrepreneurs* sebagai bagian dari kategori politik yang lebih luas yang dilakukan wirausahawan, di mana *policy entrepreneurship* adalah bagian dari literatur yang lebih luas mengenai aktivitas wirausahawan di ranah publik, politik dan pemerintahan. Secara singkat Crow mendefinisikan *policy entrepreneurs* ke dalam tiga kategori: warga negara, ahli, dan pihak terpilih (Crow, 2010). Melalui dua definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *Policy entrepreneurs* dapat datang dari berbagai latar belakang, termasuk organisasi internasional dan non-pemerintah, bisnis swasta, politisi dan bahkan pegawai negeri.

Berikutnya Mintrom (2015) dengan jelas mendefinisikan *policy entrepreneurs* sebagai aktor politik yang mencari perubahan kebijakan untuk menggeser *status quo* di bidang kebijakan publik tertentu. Tujuan dari para *policy entrepreneurs* pada definisi Mintrom adalah untuk mendobrak *status quo* pada sebuah kebijakan, tetapi motivasi dan imbalan atas pencapaian tujuan mereka bisa bermacam-macam. Misal, *policy entrepreneurs* dapat didorong oleh ideologi atau keinginan mereka untuk meningkatkan profil suatu tujuan, atau mengumpulkan uang untuk itu. Jika pengusaha kebijakan memegang (atau ingin memegang) jabatan publik, hasilnya bisa berupa keberhasilan elektoral (Wampler, 2009).

Lebih jauh Gunn (2017) mendefinisikan *policy entrepreneurs* melalui perspektif *multi-level governance* dan *global governance*. Karena menurut Gunn, *policy entrepreneurs* beroperasi di beberapa dan di seluruh skala teritorial tata kelola yang berbeda. *Pertama*, *policy entrepreneurs* dapat menjadi bagian dari pembuatan kebijakan; *Kedua*, *policy entrepreneurship* dapat hadir dalam politik lokal; *Ketiga*, dalam struktur pemerintah federal, *policy entrepreneurs* dapat beroperasi di tingkat subnasional; *Keempat*, *policy entrepreneurs* dapat bekerja di tingkat supranasional Uni Eropa; *Kelima*, *policy entrepreneurs* dapat ditemukan bekerja di tingkat negara bangsa, tetapi terlibat dengan organisasi internasional; *Keenam*, organisasi-organisasi internasional itu sendiri mungkin merupakan pengusaha kebijakan, yang berusaha mengubah kebijakan domestik. Rentang aktor yang bekerja di berbagai tingkat tata kelola sebagaimana diuraikan di atas, menggambarkan juga bagaimana *policy entrepreneurship* sejalan dengan gagasan *network governance*, yang melibatkan beragam aktor kebijakan, dan dengan pergeseran ke arah bentuk tata kelola yang lebih terpilah dan plural (Gunn, 2017).

Korelasi Policy Entrepreneurs dan Perubahan Kebijakan

Pada teori *multiple streams* milik Kingdon (1984) menjelaskan sebuah *work frame* yang terdiri dari tiga 'aliran' yaitu; masalah, konten kebijakan, dan politik. Ketiganya mengalir secara independen dan terkadang bertemu. Perubahan kebijakan paling mungkin terjadi ketika ketiga aliran tersebut 'digabungkan', hal ini menyebabkan terjadinya perubahan yang bergantung pada jenis 'jendela peluang' manakah yang terbuka dan apa saja aktivitas para *policy entrepreneurs* (Zahariadis, 2007). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebuah kebijakan dapat memiliki peluang untuk dapat diubah oleh *policy entrepreneurs* melalui strategi dan kemampuan yang dimilikinya.

Teori koalisi advokasi yang dikemukakan oleh Sabatier (1988) mendefinisikan koalisi advokasi sebagai orang-orang dari berbagai posisi (misalnya, pejabat terpilih dan lembaga, pemimpin kelompok kepentingan, peneliti) yang berbagi sistem kepercayaan tertentu yaitu, seperangkat nilai dasar, asumsi kausal, dan persepsi masalah yang saling berkoordinasi dari waktu ke waktu (Sabatier, 1988). Melalui kerangka koalisi advokasi ini dapat dijelaskan bagaimana ide-ide perubahan muncul dari kelompok orang yang bersatu di sekitar suatu masalah dan berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan berkembang ke arah tertentu sesuai keinginan kelompok tersebut.

Sedangkan Mintrom dan Vergari, menunjukkan bagaimana *policy entrepreneurship* dan koalisi advokasi saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang berbeda untuk memahami perubahan kebijakan. *Policy entrepreneurs* dapat membangun koalisi advokasi melalui pembingkai masalah melalui memaksimalkan peluang untuk menarik mitra koalisi dengan menunjukkan bagaimana kepentingan anggotanya akan dilayani jika bergabung di dalamnya.

Peran *policy entrepreneurs* dalam membangun koalisi dan berjejaring baik di dalam dan di sekitar pemerintah berguna untuk mengembangkan argumen yang tepat sehingga dapat mempengaruhi pembuat keputusan selama perumusan kebijakan (Mintrom & Vergari, 1996).

Teori *punctuated equilibrium*, awalnya dikembangkan oleh Baumgartner dan Jones (1993), menjelaskan bagaimana proses politik umumnya dicirikan oleh stabilitas dan inkrementalisme. Lindblom (1968) berpendapat bahwa mempertimbangkan berbagai pandangan di antara pembuat kebijakan, kebulatan suara akan sulit untuk dicapai, sehingga kebijakan merupakan produk kompromi dari para pembuat kebijakan. Artinya, ruang lingkup untuk mempertimbangkan peran *policy entrepreneurs* dalam hal ini dapat dibagi ke dalam dua konseptualisasi yaitu *sustainability* dalam kebijakan dan perubahan dalam pembuatan kebijakan.

Sedangkan Mintrom (2015) menyatakan bahwa *policy entrepreneurship* tidak hanya kompatibel dengan inkrementalisme tetapi juga menunjukkan fakta bahwa pencarian strategis terhadap perubahan inkremental dapat memungkinkan *policy entrepreneurs* untuk mencapai perubahan kebijakan yang signifikan, karena mampu menghilangkan oposisi potensial yang akan menyertai pencarian. (Mintrom, 2015).

Faktor kontekstual dan institusional dapat memfasilitasi atau menggagalkan peluang yang terbuka bagi *policy entrepreneurs*. Mempertimbangkan pentingnya institusi atau lembaga bagi *policy entrepreneurship*, memunculkan ruang lingkup yang cukup besar untuk melibatkan aspek teoretis yang lebih dekat dengan literatur neo-institusionalisme. Adaptasi teoritis yang lebih luas dari neo-institusionalisme untuk studi *policy entrepreneurship* dapat ditemukan pada penelitian Bakir (2009). Penerapan kebijakan kewirausahaan Bakir memberikan wawasan mengenai perdebatan literatur institusional tentang ide-ide normatif dan kognitif untuk menjelaskan perubahan institusional (Bakir, 2009). Penelitian ini melibatkan analisis gagasan, wacana dan kepentingan untuk memperhitungkan berapa lama periode keseimbangan pada lembaga yang diliputi oleh krisis sehingga mengakibatkan kebijakan yang mendasar dan perubahan kelembagaan melalui *policy* dan *entrepreneurship*.

Dalam studi ini, *policy entrepreneurs* dan kelembagaan didefinisikan sebagai individu yang memobilisasi ide, menyelesaikan konflik, dan mengarahkan perubahan kebijakan dan kelembagaan (Bakir, 2009). Bakir juga menemukan analisis *policy entrepreneurs* sebagai aktor yang beroperasi di dalam institusi pada kondisi krisis memberikan kekuatan historis institusionalisme (Bakir, 2009). Bakir juga menemukan inovasi kelembagaan dan kebijakan lebih mungkin terjadi ketika *policy entrepreneurs* bersama komunitas kebijakan domestik dan transnasional memediasi berbagai ide dan wacana di dalam dan di antara komunitas-komunitas ini (Bakir, 2009).

Eksistensi Policy Entrepreneurs Di Indonesia

Pada bab ini, penulis mengeksplor eksistensi serta keterlibatan *policy entrepreneurs* di Indonesia berdasarkan artikel penelitian milik Iskhak Fatonie (2020) dan penelitian tesis milik Ria Arief (2021). Kedua peneliti mengeksplor kehadiran *policy entrepreneur* melalui *think tank organizations* yang ada di Indonesia, namun memiliki perbedaan pada subjek penelitiannya.

Fatonie (2020) menggunakan studi kasus Undang-Undang Desa yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, ia mengkaji bagaimana *think tank* di Indonesia sebagai *policy entrepreneur* mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam proses pembangunan. Penelitiannya juga mengeksplorasi bagaimana *think tank* berinteraksi dengan lembaga pemerintah, parlemen, universitas, media, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan LSM untuk menciptakan jaringan kebijakan dan mencapai perubahan kebijakan.

Institute of Research and Empowerment (IRE) didefinisikan sebagai LSM *think tank* – yaitu, sebuah organisasi non-partisan, sekelompok intelektual, dan memiliki kekuatan untuk menentukan sendiri agenda penelitian dan proposal kebijakan mereka yang berhubungan dengan

pemerintahan desa. Mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menangani masalah pemerintahan desa dan pengentasan kemiskinan.

IRE telah diidentifikasi sebagai *policy entrepreneurs*, dengan memanfaatkan pengetahuan, keahlian, inovasi dan ide kebijakan, advokasi kebijakan, serta jaringan kebijakan mereka untuk mengejar tujuan mereka. Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian Mintrom yang mengkorelasikan *policy entrepreneurs* dengan perubahan kebijakan melalui koalisi advokasi.

Pertama, IRE menunjukkan ketajaman sosial dengan memanfaatkan jendela peluang dan memanfaatkan jaringan kebijakan mereka dengan baik untuk mendapatkan ide dan sumber daya. *Kedua*, mereka mendefinisikan masalah sebagai penganjur perubahan kebijakan dengan menggunakan pengetahuan dan melibatkan keterampilan negosiasi dengan aktor politik dan pejabat pemerintah. *Ketiga*, mereka mengandalkan tim dan koalisi, misalnya Komunitas Pengetahuan dan Kelompok Kerja Desa. *Terakhir*, mereka juga memimpin dengan memberi contoh melalui pembentukan institusi untuk pembelajaran dan memberikan momentum untuk perubahan.

IRE melakukan seleksi dan implementasi strategi dan kegiatan dalam mengejar ide-ide mereka tentang pemerintahan desa sebagai bagian dari agenda pengentasan kemiskinan pemerintah (Meijerink & Huitema, 2010; Mintrom & Thomas, 2018; Mintrom & Vergari, 1996). IRE bekerja sama dengan lembaga donor internasional untuk menyebarkan gagasan reformasi desa. Mereka juga percaya bahwa membangun koalisi dan aliansi dengan berbagai kelompok di tingkat nasional dan lokal, termasuk media, adalah strategi paling penting untuk mendapatkan dukungan bagi inovasi kebijakan. IRE memanfaatkan masalah dan jendela politik sebagai peluang untuk meluncurkan alternatif kebijakan mereka dan bekerja sama dengan pembuat kebijakan. Sementara itu, IRE menghubungkan jaringan informal ke formal dengan pembuat kebijakan, termasuk legislator dan pejabat pemerintah. Mereka beroperasi dalam pengaturan kelembagaan tertentu melalui produksi pengetahuan dan mendefinisikan masalah. Terakhir, peran IRE dan think tank Indonesia lainnya dalam mempengaruhi pembuat kebijakan di semua tahap siklus kebijakan tetap dibutuhkan.

Arief (2021) dalam penelitiannya, menganalisis bagaimana dua lembaga *think tank* Indonesia bertindak sebagai pengusaha kebijakan yang mempengaruhi proses reformasi bantuan sosial dalam 15 tahun terakhir. Ia melakukan studi kasus komparatif antara *think tank* berbasis LSM dan *think tank* kuasi-pemerintah. Melalui penelitian ini dapat diketahui apa saja strategi mereka, seperti menyebarkan ide-ide baru dan inovatif di seluruh *multi-level government*, membangun koalisi dan memanfaatkan jendela peluang. Penelitian ini juga menyelidiki faktor yang berkontribusi pada efektivitas peran mereka sebagai *policy entrepreneurs* seperti: sumber daya dan konteks kelembagaan.

Melalui penelitian ini diketahui bahwa kedua lembaga *think tank* dapat dilihat sebagai pengusaha kebijakan yang menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi reformasi bantuan sosial. Ada contoh kesamaan mencolok dalam membangun koalisi dan memanfaatkan jendela peluang. Namun, beberapa perbedaan penting ditemukan dalam mengembangkan ide-ide inovatif di *multi-level government* dan lembaga perencanaan untuk pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh pengaturan tata kelola lembaga *think tank* yang berbeda. Studi kasus ini juga menyoroti peran penting sumber daya organisasi dan konteksnya dalam menentukan keberhasilan pengusaha kebijakan. Pada gilirannya, kedua organisasi *think tank* menunjukkan reformasi bantuan sosial adalah proses yang sangat kompleks dan politis. Oleh karena itu, temuan mendukung hipotesis tesis bahwa lembaga *think tank* di Indonesia memainkan peran penting dalam mempengaruhi reformasi bantuan sosial sebagai *policy entrepreneurs*.

Kesimpulan

Melalui artikel ini dapat diketahui bahwa *policy entrepreneurs* memiliki potensi untuk memberikan kontribusi substansial dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. Mintrom dan Norman (2009) berhasil menggambarkan tingkat kompatibilitas yang tinggi antara *policy entrepreneurship* dan teori perubahan kebijakan melalui pendekatan teoretis dari *multiple streams*, koalisi advokasi, inkrementalisme dan *punctuated equilibrium*, serta neo-institusionalisme. Melalui artikel penelitian milik Iskhak Fatonie (2020) dan penelitian tesis milik Ria Arief (2021) yang mengeksplor kehadiran *policy entrepreneur* melalui *think tank organizations* di Indonesia, diketahui bahwa strategi dan pemanfaatan jendela peluang menjadi faktor yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi *think tank* untuk mencapai tujuannya. Melalui kedua penelitian yang dibahas sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa lembaga *think tank* di Indonesia memainkan peran penting dalam mempengaruhi reformasi birokrasi yang lebih terbuka pada aktor non-partisan sebagai *policy entrepreneurs*.

Daftar Pustaka

- Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, R. (2021). *Comparative Study of Indonesian Think Tanks as Policy Entrepreneurs in Influencing Social Assistance Reform*. <https://minerva-access.unimelb.edu.au/items/e99b0970-e347-5dbe-9498-6e300217c41b>
- Arifin, Zainal. (2012). Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bakir, C. (2009), 'Policy entrepreneurship and institutional change: multilevel governance of central banking reform', *Governance*, 22(4), 571–98.
- Crow, D.A. (2010), 'Policy entrepreneurs, issue experts, and water rights policy change in Colorado', *Review of Policy Research*, 27(3), 299–315.
- Farida Isroani, Pengaruh Media Google Classroom Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Terhadap Prestasi Belajar Siswa, *Sustainable: Junal Kajian Mutu Pendidikan*, 2022
- Fatonie, I. (2020). The role of Indonesian Think Tanks as policy entrepreneurs in policy development of village governance. *Journal of Asian Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1829354>
- Gunn, A. (2017). Policy entrepreneurs and policy formulation. In *Handbook of Policy Formulation*. <https://doi.org/10.4337/9781784719326.00024>
- Kingdon, J.W. (1984), *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Reprinted in 1995, Boston: Little, Brown & Company.
- Lindblom, C.E. (1968), *The Policymaking Process*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Meijerink, S., & Huitema, D. (2010). Policy entrepreneurs and change strategies: Lessons from sixteen case studies of water transitions around the globe. *Ecology and Society*, 15(2), 2. <https://doi.org/10.5751/ES-03509-150221>
- Mintrom, M. & Vergari, S. (1996), 'Advocacy coalitions, policy entrepreneurs, and policy change', *Policy Studies Journal*, 24(3), 420–34
- Mintrom, M. & Norman, P. (2009), 'Policy entrepreneurship and policy change', *Policy Studies Journal*, 37(4), 649–67.
- Mintrom, M. (2015), 'Policy entrepreneurs and morality politics: learning from failure and success', in Narbutaité Aflaki, I., Petridou, E. and Miles, L. (eds). *Entrepreneurship in the Polis: Understanding Political Entrepreneurship*. Aldershot: Ashgate, pp. 103–17.
- Mintrom, M., & Thomas, M. (2018). Policy entrepreneurs and collaborative action: Pursuit of the sustainable development goals. *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.092710>
- Petridou, E., Narbutaité Aflaki, I. & Miles, L. (2015), 'Unpacking the theoretical boxes of political entrepreneurship', in Narbutaité Aflaki, I., Petridou, E. & Miles, L. (eds). *Entrepreneurship in the Polis: Understanding Political Entrepreneurship*. Aldershot: Ashgate, pp. 1–16.
- Snyder, H. (2019). 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines'. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Wampler, B. (2009), 'Following in the footsteps of policy entrepreneurs: policy advocates and pro forma adopters', *Journal of Development Studies*, 45(4), 572–92.
- Zahariadis, N. (2007), 'The multiple streams framework', in Sabatier, P.A. (ed.). *Theories of Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press, pp. 65–92.
- World Bank. (2006). [Making the new Indonesia work for the poor \(worldbank.org\)](http://www.worldbank.org)